
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Sri Delfi Nakii¹, Rusli Isa², Yacob Noho Nani³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : sridelfy04@gmail.com¹, rusli_isa@ung.ac.id², yacobnani@ung.ac.id³

Article History:

Received: 25 Juni 2023

Revised: 08 Juli 2023

Accepted: 09 Juli 2023

Keywords: *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan*

Abstract: *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di BAPPEDA Provinsi Gorontalo, yang dilihat dari aspek: sistem kelembagaan (organization), pemahaman semua pihak (interpretation), pelaksanaan pencapaian tujuan (application). Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dengan menggunakan sumber data yang dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di BAPPEDA Provinsi Gorontalo telah menerapkan SIPD yang diupayakan oleh Kemendagri. Pada tahap pengendalian sistem informasi dan pengendalian prosedural, sudah optimal karena untuk sistem informasi itu sendiri sangat membantu SKPD dalam menginput data. Pada tahap pengendalian fasilitas masih kurang akan tetapi bisa diselesaikan secara cepat. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di BAPPEDA Provinsi Gorontalo untuk sistem kelembagaan (organization), sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada pemahaman semua pihak (interpretation) masih belum optimal karena pada tahapan ini masih ada sebagian orang yang belum paham akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara yaitu melaksanakan sosialisasi atau membuat BIMTEK tentang pemahaman mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan pada pencapaian tujuan (application) sudah dilaksanakan dengan baik.*

PENDAHULUAN

Sistem informasi merupakan hal yang mutlak ada dalam setiap badan organisasi, karena dengan adanya sebuah sistem informasi ini akan membantu pelaksanaan tata kerja dari pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri sehingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik dan

sebagaimana yang diharapkan. Sistem informasi ini akan berjalan secara *online*, efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat yang akan memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan dimana faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data melalui sebuah sistem data dan informasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam upaya menelusuri berbagai potensi dan permasalahan yang ada di era digital ini, tidak cukup diekplorasi melalui data manual, yang tentunya sangat terbatas, dan memerlukan waktu yang lama, sehingga program pembangunan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat tidak dapat terwujud dengan baik.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengatur informasi pemerintahan daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata pemerintahan yang akuntabel dan efisien. melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Dalam hal ini peneliti menemukan adanya permasalahan dalam penginputan di SIPD yaitu kurangnya sinkronisasi kelembagaan badan anggaran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terdapat tiga jenis pengendalian data dan informasi yaitu pengendalian sistem informasi yang kurang maksimal dalam penginputan dan penyimpanan data, pengendalian prosedural yang kurang berjalan dengan baik, dan pengendalian fasilitas terdapat beberapa pegawai atau operator yang masih kurang maksimal dalam proses penginputan data karena sering kali ada perubahan dalam pengelolaan aplikasi web tersebut sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas dan pencairan dana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membahas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan indikator yaitu pengendalian sistem informasi, pengendalian prosedural, pengendalian fasilitas, sistem kelembagaan, pemahaman semua pihak, pelaksanaan pencapaian tujuan.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban (2014:3) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Dwiyanto (2021: 109) menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Publik telah matang menjadi ilmu yang mampu mensejajarkan diri dengan induknya, Ilmu Politik dan Ilmu Manajemen, sebagai hasil dari pencapaian tersebut.

Menurut (Putra, 2022) administrasi publik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis,

pemerintah sekarang harus melayani masyarakat. Inovasi, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penggunaan teknologi, penguatan institusi publik, partisipasi dalam pengembangan kapasitas, desentralisasi penyediaan layanan, layanan, dan kemitraan antara publik dan sektor swasta semuanya harus menjadi sarana yang efektif untuk mencapai hal ini.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik (Mahi dan Mahi et al., (2017:29). Pendekatan yang paling humanistik yang ingin dicapai, maka kepentingan untuk menghadirkan pemenuhan kepentingan dari berbagai pihak sangat perlu menjadi sekala prioritas, hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan melibatkan banyak pihak. Perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu (1) pendekatan proses, bahwa kegiatan adalah merupakan kegiatan yang mengandung tahapan-tahapan (2) pendekatan nilai, yakni penyusunan perencanaan pembangunan mengandung nilai-nilai (3) pendekatan kelembagaan, bahwa pelaksanaan perencanaan juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan sumberdaya, (4) Pendekatan strategis, bahwa perencanaan adalah merupakan langkah-langkah strategis, (5) pendekatan partisipatif, melibatkan swasta dan masyarakat dalam meningkatkan penggunaan sumberdaya secara produktif, (6) pendekatan sistem, bahwa perencanaan adalah mencakup bidang kehidupan yang luas dan bersifat komprehensi, (7) Pendekatan politis, bahwa proses perencanaan agar dapat diterima dan bersifat mengikat secara umum maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi sesuai dengan tingkatan pemberlakuan (Tohopi et al., 2021)

Sistem Informasi

Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Dalam perkembangan zaman, didalam organisasi suatu sistem informasi sangat dibutuhkan dan sangat pesat terjadi perkembangan. (Ruhana, 2017) Sistem informasi menurut Davis (1991:91) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Menurut (Dengen & Hatta, 2009) untuk mewujudkan *good governance* maka pembangunan SIPD harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, adanya kepemimpinan, regulasi, serta tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Lingkup pengembangan Sistem Informasi Pemerintah sesuai konseptual ini terdiri dua kelompok besar yang saling mendukung yakni aspek teknis dan non teknis. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sistem Informasi adalah adanya manajemen perubahan dalam penerapan aspek teknis maupun non teknis sebagai akibat dari perubahan proses bisnis yang dinamis.

E-Government

Menurut Hary Gunarto dan Budi Sutedjo (dalam Ety, 2013) terdapat tiga jenis pengendalian data dan informasi sebagai berikut: a) Pengendalian Sistem Informasi, b) Pengendalian Prosedural, dan c) Pengendalian Fasilitas. Ketiga prosedur pengendalian tersebut jika dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik, diyakini dapat memberikan pengamanan

yang optimal terhadap data dan informasi yang terkandung dalam Sistem Informasi, dan mampu menekan resiko terjadinya gangguan keamanan terhadap Sistem Informasi secara keseluruhan. Informasi adalah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan makna dan meningkatkan pengambilan keputusan. Akibatnya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik karena kuantitas dan kualitas informasi meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan sumber data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai fokus penelitian. (Tui et al., 2023)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai BAPPEDA Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD). Data diambil untuk mendapatkan informasi langsung mengenai Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo tentang pengendalian sistem informasi, pengendalian prosedural, pengendalian fasilitas, sistem kelembagaan, pemahaman semua pihak, dan pelaksanaan pencapaian tujuan. Data sekunder yaitu peneliti memperoleh data dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi, melalui kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan lainnya. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Data-data lain yang dimiliki BAPPEDA Provinsi Gorontalo terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aplikasi atau website resmi BAPPEDA Provinsi Gorontalo dan juga dari pusat Kementerian Dalam Negeri.

Teknik pengumpulan data menurut H. Z. Abdussamad & SIK, (2021:142) ialah tahap yang cukup signifikan berpengaruh dalam penelitian, dimana maksud utama dalam meneliti ialah memperoleh data. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Wawancara dalam hal ini peneliti menggunakan alat rekam saat wawancara agar peneliti tidak kehilangan jawaban penting informan, dimana penggunaan alat rekam telah mendapatkan ijin dari informan. Dokumentasi yang digunakan berupa foto, gambar, serta data-data mengenai tampilan dari SIPD tersebut dari tahun 2021,2022,2023.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menurut Sugiyono (dalam Hastomo, 2022) mengatakan bahwa proses analisis data deskriptif melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu: (1) reduksi data atau penyederhanaan data yaitu

mendengarkan hasil rekaman wawancara dengan informan, kemudian merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok serta menganalisisnya, (2) sajian data yaitu menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam informasi yang sederhana, selektif, dan membantu pemahaman tentang maknanya, (3) Penarikan kesimpulan yaitu berdasarkan matriks atau bagan yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik masalah penelitian, kemudian peneliti membuat simpulan yang bersifat bebas dan terbuka, namun lebih rinci, mengakar dan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di BAPPEDA Provinsi Gorontalo

1. Pengendalian Sistem Informasi

Dalam (Ety, 2013) menjelaskan bahwa Pengendalian Sistem Informasi ini merupakan cara dan upaya untuk meyakinkan bahwa keakuratan dan validitas kegiatan sistem informasi dapat dilaksanakan kapan dan dimana kegiatan itu dioperasikan. Pengendalian ini perlu diciptakan untuk melakukan kegiatan input data, kegiatan pemrosesan, dan penyimpanan data, sehingga implementasi sistem dapat dilaksanakan dengan baik dan aman. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait Fokus dan Sub Fokus penelitian ditemukan bahwa, proses Pengendalian Sistem Informasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BAPPEDA Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pada sistem ini sudah hampir 3 tahun terakhir sudah digunakan untuk penginputan Dokumen RPJMD, RKPD dan dokumen lainnya. Sehingga sistem pengendalian informasi ini sudah tidak menggunakan sistem manual lagi yang harus dibuat melalui excel dan dikirim ke pusat. Tetapi sekarang sudah tidak lagi menggunakan sistem manual seperti itu. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Karundeng et al., 2021) bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bangun karena Kemendagri melihat ada beberapa masalah seperti belum tersedianya *database* yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan, data pembangunan daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antar daerah dan pusat, belum terstandarisasinya kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, beraneka *platform* sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah belum tepat waktu, untuk itu masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan sebuah portal sistem yang dapat membantu daerah untuk melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional, dengan permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu masalah ini. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Pengendalian Sistem Informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sudah terkontrol di Pusat yaitu Kemendagri. Sehingga ada kendala atau kerusakan pada sistem ini selalu berkoordinasi dengan Kemendagri.

2. Pengendalian Prosedural

Menurut Dalam (Ety, 2013) menjelaskan bahwa Pengendalian Prosedural menjelaskan bahwa untuk menjaga agar layanan informasi cukup aman, maka selain pengendalian Sistem

Informasi, dibutuhkan pengendalian Prosedural yang mengatur pengoperasian administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait Fokus dan Sub Fokus penelitian ditemukan bahwa, proses Pengendalian Prosedural sudah efektif dan efisien. Karena pada proses sistem ini sudah berjalan dengan apa yang diharapkan oleh BAPPPEDA itu sendiri. Apabila terjadi sebuah kesalahan pada sistem Pengendalian prosedural dalam hal ini sistem jaringan yang *error* atau *user* yang terkendala maka mereka akan menunggu satu jam untuk memperbaiki itu dan akan dikonsultasi oleh Kemendagri. Sebelum mengeluarkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini, pemerintah menggunakan SIMDA *integrated*. SIMDA *integrated* adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk Jurnal *Governance* (1), 2, 2013 mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau *database* terintegrasi. Keterkaitan penelitian ini dengan (Karundeng et al., 2021) bahwa sistem Prosedural harus dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Para pelaksana harus bekerja sama dalam memahami dan menjalankan serta mengoprasikan portal sistem yang baru digunakan ini, pimpinan birokrasi harus dapat mengatur dan mengarahkan wewenangnya kepada para pelaksana sesuai dengan struktur yang ada dalam BAPPPEDA. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Pengendalian Prosedural pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, untuk proses *backup* data dan penyimpanan data itu dilakukan oleh Bappededa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setiap penginputan itu selalu di *backup* datanya. Prosedur *backup* data pada Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan program yang disesuaikan dengan tingkat urgensinya.

3. Pengendalian Fasilitas

Dalam (Ety, 2013) menjelaskan bahwa Pengendalian fasilitas menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi fasilitas fisik sistem informasi yang berbasis teknologi informasi serta peralatan pendukungnya dari kerusakan dan pencurian. Berikut gambar tampilan SIPD:



Gambar 4.3 Penampilan Awal Sistem Infomasi Perintahan Daerah

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait Fokus dan Sub Fokus penelitian ditemukan bahwa, proses pengendalian Fasilitas yang digunakan di BAPPEDA serta SKPD lain sudah lengkap, kelebihan dari sistem ini adalah karena SIPD ini server nasional, mudah diakses dan cepat akan tetapi dalam sistem ini tetaplah memiliki kekurangan ialah kurangnya narasumber untuk bertanya, karena pusatnya adalah kemendagri jadi ketika ada masalah, BAPPEDA harus bertanya ke pusat atau kemendagri tetapi membutuhkan proses waktu yang lama atau memakan waktu, dan sistem juga belum terlalu sempurna. Pengendalian sistem informasi dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dilakukan, baik secara langsung yakni di tempat dilaksanakannya sistem informasi itu, maupun secara tidak langsung melalui laporan-laporan secara tertulis dan secara lisan. Hal ini dilakukan untuk melindungi fasilitas fisik sistem informasi yang berbasis teknologi informasi serta peralatan pendukungnya dari kerusakan dan pencurian. Upaya pengendalian fasilitas dapat dilakukan, antara lain melakukan kompresi agar dapat menjaga tingkat kepadatan lalu lintas data dalam jaringan, enkripsi, dan deskripsi untuk menjaga keamanan data dalam *hard disk* maupun yang sedang melintas dalam jaringan. Fasilitas ini diartikan sebagai fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini juga meliputi fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Fasilitas ini juga merupakan faktor penting dalam pengimplementasian kebijakan. Namun, tanpa fasilitas pendukung, pengimplementasian kebijakan juga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Karundeng et al., 2021) bahwa pengendalian Fasilitas pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini memfasilitasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada penganggaran, dalam menjaga konsistensi perencanaan awal sampai pada penganggaran, atau harus konsisten dalam program kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan tujuan sasaran dalam perencanaan maka dibutuhkan sebuah sistem agar tidak ada lagi penambahan program, pengurangan program ketika semua sudah diinput dari perencanaan awal dengan batas waktu yang ditentukan dalam perencanaan pembangunan, dengan harapan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan online akan memberikan kemudahan bagi setiap instansi dan dapat terlaksana dengan transparansi. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 memiliki tiga ruang lingkup yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Pengendalian Fasilitas fisik ini apabila terjadi pencurian data atau peralatan pendukung dari kerusakan fasilitas sistemnya selalu dikoordinasikan oleh pihak Kemendagri dan tidak akan terjadi pencurian data sedikitpun. Kecuali terjadi kerusakan sistemnya akan terdeteksi oleh Kemendagri itu sendiri dan akan di kirim surat pemberitahuan ada perbaikan kerusakan sistemnya, sehingga setiap Instansi yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mengetahuinya.

4. Sistem Kelembagaan (*Organization*)

Menurut teori Charles O. Jones dalam (Tahir, 2023) Pengorganisasian diartikan sebagai struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program, sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Mengatakan organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.

Berdasarkan dengan hasil pengamatan dilapangan yang dapat dilihat dari faktor Sistem

Kelembagaan/Organization Pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana sistem Kelembagaan/Organisasi ini sudah terstruktur dan sudah mendapatkan *user* dan *password* pada akun masing untuk mengakses melalui Website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *user* atau *password* masing-masing bidang itu berbeda karena sistem ini digunakan pada saat penginputan data atau dokumen yang diperlukan dalam hal ini kelengkapan sebuah data.

Banyak pihak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, dengan tata kelola administrasi dalam bentuk sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang terkoneksi, dengan berbagai pihak yang diinginkan, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dengan para perencana pembangunan. Proses yang mampu menghadirkan aksesibilitas yang tinggi, mengurangi jalur distribusi informasi, kewenangan, dan tanggungjawab pembangunan, yang dapat diletakkan pada pundak semua pihak yang berwenang maupun yang berkeinginan terlibat dalam proses pembangunan

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Ponto & Tasik, 2016) dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi". Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Kelembagaan/ Organisasi bahwa struktur organisasi pelaksana sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BAPPEDA Provinsi Gorontalo telah terbentuk dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang keahlian mereka, seperti bidang perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pada bidang keuangan sudah mengetahui penggunaan sistem informasi ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari Kemendagri bisa mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

5. Pemahaman Semua Pihak (*Interpretation*)

Menurut teori Charles O. Jones dalam (Tahir, 2023) Interpretasi diartikan untuk para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Berdasarkan dengan hasil pengamatan dilapangan yang dapat dilihat dari faktor Pemahaman Semua Pihak/Interpretasi di BAPPEDA Provinsi Gorontalo telah memahami sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) apabila terdapat ada beberapa yang belum paham pasti mereka gerak cepat untuk bisa mamahami pihak yang belum paham itu. Tetapi walaupun banyak yang belum tahu mereka akan membauat BIMTEK atau penyuluhan mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara garis besar Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa jenis elemen data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) akan

membantu Kepala Daerah/Kepala Badan/Kepala Instansi/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja masing-masing dalam mendapatkan informasi dan data yang akurat. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Ponto & Tasik, 2016) Keberhasilan Pelaksanaan SIPD yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dalam hal ini Fasilitator. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPEDA dalam menjalankan programnya yaitu berpedoman pada rencana strategi dan program-program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan di jadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang perencanaan. Untuk itu kondisi yang diharapkan BAPPEDA pada masa yang akan datang. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Pemahaman Semua Pihak/ Interpretasi sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu terkait juga dengan konsistensi pelaksana yaitu Kemendagri.

6. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan (*Application*)

Menurut teori Charles O. Jones dalam (Tahir, 2023) Penerapan aplikasi diartikan sebagai perlu adanya prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan, sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Berdasarkan dengan hasil pengamatan dilapangan yang dapat dilihat dari faktor Pelaksanaan Pencapaian Tujuan/Interprestasi Pada BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan adanya Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaannya sudah sesuai apa yang diharap instansi terkait terutama di BAPPEDA. Untuk BAPPEDA sendiri sudah berjalan sejak tahun 2020 tetapi pada tahun itu masih uji coba apakah sistem ini akan berjalan sesuai dengan tujuan Kemendagri atau tidak, akan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan dengan apa yang menjadi patokan atau tujuan bersama yaitu dalam pelaksanaan penginputan dokumen seperti RPJMD, RKPD dan dokumen lainnya. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi menyeluruh serta mempermudah penggunaanya dari tingkat yang paling bawah seperti desa untuk mengelola data usulan atau keluhan masyarakat yang sudah dimusyawarahkan dan data usulan tersebut dapat diatur berdasarkan pengelompokkan kegiatan prioritas yang nantinya data tersebut akan dinaikkan ke Kecamatan, kemudian dikirimkan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelola perencanaan pembangunan daerah untuk masyarakat. Aspek aplikasi yaitu SIPD mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Arief & Hayati, 2021) untuk pengaplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga merupakan suatu percepatan pelaksanaan Inpres Nomor: 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government. *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan cara mengaplikasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini secara nasional yang nantinya mempunyai efek positif dalam

mempercepat proses penerapan *e-government* dan Pemerintahan yang berbasis *computer* sehingga lebih mempermudah kinerja dari Pemerintahan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan proses Pelaksanaan Pencapaian Tujuan/Interprestasi Pada BAPPPEDA Provinsi Gorontalo memiliki tim pengelolaan SIPD dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Jadi untuk BAPPPEDA itu sendiri apabila ada SKPD yang datang untuk bertanya bisa langsung berkomunikasi melalui grup whatsapp atau langsung datang ke BAPPPEDA untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kendala SKPD lainnya. BAPPPEDA juga selalu meningkatkan kepada SKPD lainnya agar untuk menginput data dan memasukan data perencanaan masing, agar pelaksanaan pencapaian tujuan sistem informasi ini dapat berjalan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan apapun.

KESIMPULAN

Simpulan

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (*E-Government*) dilihat dari Pengendalian Sistem Informasi sudah berjalan selama tiga tahun terakhir mulai dari 2021 sampai 2023, sehingga pada pengendalian sistem informasi ini sangat membantu pekerjaan yang sebelumnya hanya menggunakan sistem manual. Pada tahap Pengendalian Prosedural sudah efektif dan efisien dalam memberikan layanan informasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Pengendalian Fasilitas, pada pengendalian fasilitas secara fisik sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada juga kendalanya seperti data atau sistem *error*.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dilihat dari, Sistem Kelembagaan yaitu dalam hal ini sudah cukup memadai. Pemahaman Semua Pihak belum optimal karena masih ada yang belum paham dengan adanya sistem ini, mereka langsung membuat BIMTEK mengenai penggunaan SIPD. Selanjutnya Pelaksanaan pencapaian Tujuan dapat dilihat pelaksanaan perencanaan daerah sudah terwujud melalui penggunaan SIPD.

Saran

1. Diharapkan dalam pengendalian fasilitas ini harus ditingkatkan lagi, agar fasilitas fisik yang digunakan pegawai untuk mengakses SIPD tidak ada kendala dalam hal ini jaringan yang error, atau maintenance/pemeliharaan itu butuh waktu satu hari dalam perbaikan.
2. Diharapkan pada pemahaman sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini harus dievaluasi atau ditanyakan kepada pihak-pihak yang bisa mengakses sistem ini apakah mereka sudah memahami 100% penggunaan sistem ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DILIHAT DARI ASPEK STRUKTUR BIROKRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
-

- TABALONG. *JAPB*, 4(2), 732–749.
- Davis, G. B. (1991). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1. *PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta*.
- Dengen, N., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(1), 47–54.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Ety, R. (2013). Sistem Informasi Manajemen Edisi 2. *Jakarta: MitraWacana Media*.
- Hastomo, W. (2022). *INOVASI MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS BEHAVIORISTIK DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI SD MUHAMMADIYAH KUTOARJO DAN SD MUHAMMADIYAH KEMIRI*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Ilmu Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Isu*. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Ponto, A., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(20), 36–52.
- Putra, F. (2022). Village development initiative as an alternative strategy of rural poverty reduction: An evaluation of village fund program in Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, 5(04), 1453–1460.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2).
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89)
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154.
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., & Abdussamad, J. (2023). PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BONE BOLANGO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342.

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah